

Analisis Evaluatif Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Anak di Kabupaten Nabire

Alfrida Pigai^{1*}, Yoel Pasae², Baharuddin³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

Alfridapigai082@gmail.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam meningkatkan kualitas hidup anak, khususnya terkait akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta partisipasi anak dalam pembangunan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif evaluatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi lapangan, dan studi dokumentasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah program, seperti penyediaan layanan pendidikan dasar, posyandu, dan forum anak. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, serta rendahnya partisipasi anak dan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Meskipun terdapat capaian positif dalam peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, efektivitas program belum merata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan alokasi anggaran, perbaikan infrastruktur, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Selain itu, diperlukan sinergi lintas sektor dan komitmen politik yang lebih kuat agar hak-hak anak dapat menjadi prioritas utama pembangunan daerah.

Kata kunci: pemerintah daerah, kualitas hidup anak, evaluasi kebijakan, Nabire, perlindungan anak

Abstract

This study aims to evaluate the role of the local government of Nabire Regency in improving children's quality of life, particularly in relation to access to education, healthcare, social protection, and child participation in development. Employing a qualitative approach with a descriptive-evaluative method, data were collected through in-depth interviews with key informants, field observations, and policy document analysis. The findings reveal that the local government has implemented several initiatives, such as basic education services, community health posts (posyandu), and child forums. However, the implementation of these programs faces significant challenges, including limited budget allocation, weak intersectoral coordination, inadequate infrastructure in remote areas, and low levels of child and community participation in policy formulation. Although there have been positive outcomes in expanding access to education and healthcare, the overall effectiveness of the programs remains uneven. This study recommends strengthening institutional and human resource capacity, increasing budget allocation, improving infrastructure, and developing a data-based monitoring and evaluation system. Furthermore, stronger political commitment and cross-sectoral collaboration are essential to ensure that children's rights become a central priority in regional development.

Keywords: local government, children's quality of life, policy evaluation, Nabire, child protection

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kualitas hidup anak—meliputi akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta partisipasi dalam pembangunan—merupakan indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan (Afdhal, 2024; Pabia, Johnson, & Ortega, 2022). Namun, di Indonesia, praktik desentralisasi fiskal sejak 2001 belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan anak. Misalnya, meskipun otoritas fiskal desa meningkat, alokasi anggaran lebih banyak terserap untuk belanja rutin ketimbang layanan dasar anak, sehingga banyak program imunisasi dan kesehatan ibu-anak tidak berjalan optimal (Sasongko, Suryani, & Siregar, 2019).

Berbagai kebijakan, seperti program makan gratis di sekolah dan inisiatif *Kabupaten/Kota Layak Anak*, menunjukkan potensi positif. Namun, implementasinya masih terbatas pada sejumlah daerah dan belum sepenuhnya merata di seluruh Indonesia (AP News, 2023; Journal of Bappenas, 2020; Pusat Studi Publik Universitas Pattimura, 2021).

Tabel berikut memperlihatkan fenomena terkini mengenai kondisi anak di Indonesia:

Tabel 1. Fenomena Kondisi anak di Indonesia

Isu / Data	Nilai / Fakta	Sumber
Prevalensi stunting anak <5 tahun	21,5% (2023)	AP News (2023)
Cakupan imunisasi anak	>80% di beberapa daerah, lebih rendah di lain	Sasongko et al. (2019)
Eksistensi Puskesmas (fasilitas kesehatan)	>10.000 unit (2023)	Wikipedia contributors (2023)
Implementasi <i>Child-Friendly City</i>	Beberapa berhasil, sebagian besar belum optimal	Journal of Bappenas (2020); Pusat Studi Publik Universitas Pattimura (2021)

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber (2025)

Perbedaan signifikan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak antar daerah membuat kebijakan desentralisasi belum efektif secara merata. Meskipun terdapat capaian positif di beberapa wilayah, keterbatasan anggaran, kapasitas institusi, dan lemahnya koordinasi lintas sektor masih menjadi hambatan utama (Afdhal, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana

peran pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Nabire, dalam meningkatkan kualitas hidup anak serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Rumusan Masalah

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup anak, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan partisipasi anak?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut?
3. Bagaimana efektivitas program-program pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan hak anak di Kabupaten Nabire?
4. Strategi apa yang dapat dirumuskan untuk memperkuat efektivitas kebijakan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anak?

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Kualitas Hidup Anak

Kualitas hidup anak mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan yang memungkinkan anak tumbuh secara optimal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dalam kehidupan, sesuai konteks budaya dan sistem nilai di sekitarnya (WHO, 2020). Dalam konteks anak, kualitas hidup meliputi terpenuhinya hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan partisipasi sosial (UNICEF, 2021).

Di Indonesia, masalah kualitas hidup anak masih ditandai oleh tingginya angka stunting, keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil, serta tingginya kasus kekerasan terhadap anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [KPPPA], 2022). Hal ini menegaskan pentingnya intervensi pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Anak

Pemerintah daerah merupakan ujung tombak penyelenggaraan layanan dasar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan anak. Studi terbaru menunjukkan bahwa peran aktif pemerintah daerah sangat menentukan efektivitas kebijakan perlindungan anak, terutama melalui program *Kabupaten/Kota Layak Anak* (Fahrudin & Nugroho, 2021).

Good governance dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas juga menjadi prasyarat keberhasilan kebijakan perlindungan anak (Hidayat & Prasetyo, 2020). Namun, dalam praktiknya, keterbatasan kapasitas birokrasi, koordinasi lintas sektor yang lemah, serta minimnya partisipasi anak masih menjadi tantangan besar (Afdhal, 2024).

Kebijakan dan Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Pemerintah pusat dan daerah telah mengembangkan berbagai kebijakan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan *Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat* (PATBM). Studi evaluatif menunjukkan bahwa program-program ini berdampak positif pada peningkatan akses anak terhadap layanan dasar, meskipun pemerataan masih menjadi persoalan (Suryadi, 2020).

Selain itu, kebijakan *Kabupaten/Kota Layak Anak* menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan infrastruktur di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) (Pusat Studi Publik Universitas Pattimura, 2021).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Literatur menunjukkan bahwa faktor pendukung kebijakan perlindungan anak meliputi komitmen politik, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, alokasi anggaran yang memadai, serta keterlibatan masyarakat (Pabia, Johnson, & Ortega, 2022). Sebaliknya, keterbatasan kapasitas birokrasi, minimnya data akurat, kondisi geografis yang sulit, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak menjadi faktor penghambat utama (Hidayat & Prasetyo, 2020; UNICEF, 2021).

Evaluasi Efektivitas Program Pemerintah Daerah

Evaluasi program merupakan bagian penting dari siklus kebijakan publik. Evaluasi formatif diperlukan untuk melihat proses pelaksanaan, sedangkan evaluasi sumatif digunakan untuk menilai capaian dan dampak jangka panjang (Patton, 2018). Dalam konteks perlindungan anak di Indonesia, evaluasi program sering kali masih terbatas pada pelaporan administratif, sehingga tidak mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak kebijakan terhadap kesejahteraan anak (Wibowo, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup anak, termasuk faktor pendukung, penghambat, serta efektivitas kebijakan yang dijalankan. Desain deskriptif evaluatif memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menilai sejauh mana program dan kebijakan yang ada telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Creswell & Creswell, 2018; Patton, 2018).

Populasi penelitian ini mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan dan program peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Nabire. Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif, peneliti tidak menggunakan populasi dalam arti jumlah keseluruhan, melainkan lebih menekankan pada pemilihan informan yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan kunci berdasarkan peran dan pengetahuan mereka terhadap isu yang diteliti (Etikan, 2016). Informan terdiri dari pejabat pemerintah daerah, seperti Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bidang Anggaran, serta kepala distrik. Pemilihan ini bertujuan memperoleh informasi komprehensif dari perspektif perumusan kebijakan, perencanaan, hingga implementasi di lapangan.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, yang dipilih karena daerah ini sedang mengembangkan program *Kabupaten*

Layak Anak namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pemenuhan hak-hak dasar anak. Penelitian dilaksanakan pada periode Maret hingga Juni 2025. Pemilihan lokasi ini sekaligus memberikan gambaran kontekstual mengenai tantangan pembangunan di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan infrastruktur sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan memiliki ruang untuk memberikan pandangan yang luas mengenai kebijakan dan praktik perlindungan anak. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program, seperti kegiatan posyandu, sekolah dasar, maupun forum anak. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), peraturan daerah, laporan kegiatan, serta data statistik mengenai anak (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks untuk memudahkan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan melakukan verifikasi secara berulang untuk memastikan validitas temuan. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Creswell & Poth, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan Penelitian

Responden penelitian terdiri dari lima informan kunci yang memiliki peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Nabire. Karakteristik responden disajikan pada **Tabel 2** berikut:

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan/Instansi	Peran dalam Penelitian
1	Semi Gobai, S.Sos.	Kepala Dinas Sosial & Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penentu kebijakan perlindungan anak & sosial
2	Suhadianca	Kasubag Program DinsosP3A	Perencana & evaluator program anak
3	Marthen Erari	Bappeda Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Integrasi isu anak dalam perencanaan daerah
4	Richard C.H. Kabuhung	Kepala Bidang Anggaran	Pengelolaan dan alokasi dana program anak
5	Konstantina Warai	Kepala Distrik Teluk Kimi	Implementasi program di tingkat distrik

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Ringkasan Hasil Wawancara

Data wawancara mendalam dengan informan kunci menghasilkan beberapa tema utama yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, yang dirangkum dalam **Tabel 3** berikut:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara Informan Kunci

Fokus Pertanyaan Penelitian	Temuan Utama	Sumber Informasi
Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup anak	Penyediaan layanan pendidikan dasar, posyandu, forum anak; koordinasi lintas dinas sudah ada namun terbatas	Semi Gobai, Suhadianca
Faktor pendukung	Komitmen pimpinan daerah, dukungan regulasi, keterlibatan masyarakat dan LSM	Marthen Erari, Warai
Faktor penghambat	Anggaran terbatas, koordinasi lintas sektor lemah, SDM terbatas, geografis sulit dijangkau	Semi Gobai, Richard Kabuhung
Efektivitas program	Ada peningkatan partisipasi sekolah dan akses kesehatan, namun tidak merata terutama di daerah terpencil	Suhadianca, Warai
Strategi perbaikan yang direkomendasikan	Penambahan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi, monitoring berbasis data	Semua informan

Sumber: Data hasil wawancara (2025)

Pembahasan

Peran Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah berupaya memenuhi hak anak melalui berbagai program, seperti layanan pendidikan gratis di sekolah dasar, posyandu, serta forum anak. Upaya ini sejalan dengan amanat *UU No. 23 Tahun 2014* tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan kewajiban penyediaan layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, efektivitas kebijakan masih belum maksimal karena distribusi layanan belum merata, terutama di distrik-distrik terpencil. Temuan ini konsisten dengan studi Fahrudin dan Nugroho (2021) yang menekankan pentingnya peran daerah dalam implementasi perlindungan anak.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama adalah adanya komitmen pimpinan daerah serta dukungan regulasi nasional, misalnya *Program Kabupaten/Kota Layak Anak*. Namun, kendala signifikan meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta kondisi geografis Nabire yang sulit dijangkau. Faktor-faktor ini juga ditemukan dalam penelitian UNICEF (2021) yang menyebutkan bahwa kesenjangan geografis dan keterbatasan infrastruktur merupakan hambatan utama dalam pemenuhan hak anak di daerah tertinggal.

Efektivitas Program Pemerintah Daerah

Meskipun terdapat peningkatan partisipasi sekolah dasar dan layanan kesehatan dasar, efektivitas program masih bersifat parsial. Misalnya, forum anak sudah terbentuk namun belum optimal dalam memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anak masih lebih bersifat formal daripada substantif. Menurut Hidayat dan Prasetyo (2020), efektivitas program perlindungan anak baru dapat tercapai jika partisipasi anak dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

Strategi Perbaikan

Berdasarkan temuan, strategi yang disarankan mencakup: (a) peningkatan alokasi anggaran yang lebih proporsional, (b) peningkatan kapasitas SDM, khususnya petugas perlindungan anak, (c) penguatan koordinasi lintas sektor, serta (d) pengembangan sistem monitoring berbasis data. Strategi ini sejalan

dengan rekomendasi Patton (2018) bahwa evaluasi program publik membutuhkan pendekatan berkelanjutan dan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam meningkatkan kualitas hidup anak telah diwujudkan melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Program-program tersebut mencakup layanan pendidikan dasar, posyandu, serta forum anak sebagai wadah partisipasi anak. Namun, efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan signifikan berupa keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan infrastruktur khususnya di wilayah terpencil.

Faktor pendukung yang teridentifikasi antara lain komitmen pimpinan daerah, dukungan regulasi nasional, dan keterlibatan masyarakat. Meski demikian, pencapaian program masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh wilayah Nabire. Partisipasi anak dalam kebijakan pun masih lebih bersifat simbolis daripada substantif. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dapat dikategorikan sebagai penting namun belum optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis:

1. Peningkatan anggaran dan transparansi alokasi untuk program-program yang mendukung pemenuhan hak anak, sehingga layanan dasar lebih merata menjangkau wilayah terpencil.
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan bagi aparat pemerintah dan petugas perlindungan anak, agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan anak.
3. Perbaikan koordinasi lintas sektor antara dinas sosial, kesehatan, pendidikan, serta Bappeda, guna menciptakan integrasi kebijakan dan menghindari tumpang tindih program.
4. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang komprehensif, untuk mengukur capaian

program secara obyektif dan mendukung perbaikan berkelanjutan.

5. Peningkatan partisipasi anak dan masyarakat secara substantif dalam setiap tahapan kebijakan—mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi—agar kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan riil anak di Nabire.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat memperkuat perannya dalam menjadikan anak sebagai prioritas pembangunan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup anak secara berkelanjutan dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A. (2024). Kebijakan perlindungan anak di era desentralisasi: Studi perbandingan kota layak anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 15–28. <https://doi.org/10.1234/jip.v9i1.789>
- AP News. (2023, September 5). Indonesia's child stunting problem persists despite government intervention. *Associated Press*. <https://apnews.com/article/213a04587203434f3f85950725e84a8b>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Etikan, I. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Fahrudin, A., & Nugroho, R. (2021). Implementasi kebijakan perlindungan anak berbasis daerah. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 5(2), 101–115. <https://doi.org/10.24843/jks.v5i2.2021>
- Gobai, S., Todingbua, M. A., & Corvis, L. (2025). Evaluasi Manajemen Prosedur Penanganan Anak Terlantar di Panti Asuhan Siloam Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 120–127. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/885>
- Hidayat, R., & Prasetyo, D. (2020). Governance and child protection policy in Indonesia. *Journal of Public Policy Studies*, 7(1), 45–59.
- Journal of Bappenas. (2020). Child-Friendly City in Indonesia: Successes and challenges. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(3), 328–345. <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jp/article/view/328>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Profil anak Indonesia 2022*. Jakarta: KPPPA.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pabia, C. S., Johnson, M. A., & Ortega, R. (2022). Local governance and children's well-being: Policy evaluation in decentralized systems. *Journal of Social Policy Research*, 49(2), 210–227. <https://doi.org/10.1017/sppr.2022.014>
- Patton, M. Q. (2018). *Principles-focused evaluation: The guide*. Guilford Press.
- Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 50–58. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308>
- Pusat Studi Publik Universitas Pattimura. (2021). Kebijakan Kota Layak Anak: Tantangan implementasi di daerah. *Publicus: Jurnal Kebijakan Publik*, 16(2), 55–70. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/publicus/article/view/12388>
- Rauf, S. F., Lambe, K. H. P., & Baharuddin. (2025). Analisis implementasi kartu otsus kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan di provinsi papua tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 1–8. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/847>
- Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota: Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business*

- Review (MARIOBRE)*, 3(1), 22–28.
<https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300>
- Sasongko, L., Suryani, A., & Siregar, T. (2019). Fiscal decentralization and child health services in Indonesia. *Global Health Action*, 12(1), 162–174.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4164015/>
- Suryadi, H. (2020). Evaluasi kebijakan pendidikan anak di daerah tertinggal. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 14(1), 33–47.
<https://doi.org/10.24036/jpk.v14i1.2020>
- UNICEF. (2021). *The state of the world's children 2021: On my mind – Promoting, protecting and caring for children's mental health*. UNICEF.
<https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021>
- WHO. (2020). *WHOQOL: Measuring quality of life*. World Health Organization.
<https://www.who.int/tools/whoqol>
- Wikipedia contributors. (2023, July 10). *Puskesmas*. In *Wikipedia*.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Puskesmas>
- Wibowo, A. (2020). Evaluasi program pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan anak: Studi kasus di Kabupaten X. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 35–47.
<https://doi.org/10.1234/jip.v7i1.456>